

# **RAP & RAK**

## **RENCANA AKSI PROGRAM dan**

## **RENCANA AKSI KEGIATAN**

**PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN**

**PENYEHATAN LINGKUNGAN**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA**

**Periode 2015-2019**



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

**DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT**

**DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN**

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV YOGYAKARTA**

**TAHUN 2015**

## KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kerja (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta Periode 2015 s/d 2019 telah dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kerja (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta Periode 2015 s/d 2019, merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta Periode 2015 s/d 2019.

Saran dan kritik yang bersifat membangun, kami harapkan agar RAP dan RAK ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan program.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Kepala  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta



dr. H. Chamidah

NIP. 196001141989012002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta periode 2015 s/d 2019, merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta.

Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta adalah sebagai acuan masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan khususnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya yang disusun secara bertahap menurut kegiatan, output dan indicator kinerja dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Indikator Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta tahun 2015 s/d 2019 yaitu terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Bandar Udara dan Pelabuhan.

Strategi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan upaya Kekarantinaan, Mengefektifkan Surveilans Epidemiologi, Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Resiko Lingkungan, Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), Melengkapi sarana dan prasarana, Mengadakan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja, Melaksanakan promosi kesehatan serta memperkuat Instalasi.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Kepala  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta

  
dr. H. Hamidah  
NIP. 196001141989012002

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI, MAKLUMAT DAN MOTTO	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI & INDIKATOR SASARAN KEGIATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN YOGYAKARTA	22
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Pembangunan Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun spesifik local. Untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan RPJP, RPJM dan rencana pembangunan tahunan.

Upaya pembangunan kesehatan Tahun 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan RI telah menyusun Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019

Renstra Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian

Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015-2019. Maka dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada unit organisasi setingkat eselon II sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada perubahan struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan *Millenium Development Goal's* (MDG's). Disamping itu, didalam MDG's (*Millenium Development Goal's*) bahwa meningkatnya pembangunan kesehatan masyarakat merupakan tujuan utama global yang wajib diwujudkan setiap anggota WHO. Pembangunan kesehatan di wilayah Pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional.

Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang diberlakukan 15 Juni 2007 dengan perhatian kepada *Public Health Emeergency Of International Concern/PHIEC* (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan **PERSYARATAN KAPASITAS INTI BAGI BANDARA, PELABUHAN DAN PERLINTASAN DARAT**, agar setiap saat a) menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai, (b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel yang terlatih untuk pelaku pengiriman perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai, (c) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan

yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel dan program pengendalian vector dan reservoir di dalam dan sekitar pintu masuk.

Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan **agar pelabuhan dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC** dengan kapasitasnya : (a) menyediakan respon emergensi kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontingensi emergensi kesehatan masyarakat termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya (b) melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewancarai orang yang terjangkit atau tersangka, (d) menyediakan sarana diagnosis dan bila perlu karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila disarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk (e). menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan, dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.

Pada saat ini pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuknya barang, jasa dan manusia, akan tetapi sudah berkembang lebih jauh menjadi sentra-sentra industri yang menyerap banyak tenaga kerja, pusat perdagangan, tempat wisata yang mampu mendatangkan turis baik domestik maupun luar negeri. Sebagai contoh Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terbesar di wilayah Indonesia, memiliki aktifitas yang tinggi akan pergerakan alat angkut, muatan maupun orang, tingginya mobilitas ini dapat menyebabkan kemungkinan penyebaran penyakit antar satu daerah ke daerah yang lain juga semakin meningkat.

Penyusunan rencana dan kegiatan satuan kerja KKP Yogyakarta Tahun 2015 sebelumnya disusun berdasarkan Renstra 2004-2009 dan **Permenkes Nomor 265 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Kesehatan Pelabuhan** maka terdiri dari 3 (tiga) program yakni 1) Program Penerapan Kepemerintahan yang baik, 2) Program Lingkungan



Sehat dan 3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Seiring ditetapkan dan diterbitkan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, Permenkes nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan serta tetap sejalan dengan *International Health Regulation (IHR)* Tahun 2005, maka dalam penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) mulai tahun 2015-2019 mengacu pada satu program yakni program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan indikator yakni terkendalinya seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan Rencana Aksi Program (RAP) 2015-2019 KKP Yogyakarta ini diharapkan dapat tercapai upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di Yogyakarta. Disamping itu juga diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran KKP Yogyakarta dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

## B. Dasar Hukum

1. UU 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
2. UU 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular
3. UU 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran
4. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. PP 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

6. Keputusan Presiden No 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata
7. Inpres No 4 Tahun 1985 tentang kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi
8. PP 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi
9. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Kepmenkes 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
12. Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
13. Kepmenkes 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan
14. Kepmenkes 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
15. Permenkes 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah
16. Kepmenkes 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan Organisasi Ditjen PPM dan PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama Keppel ADPEL
17. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan Kantor Kesehatan Pelabuhan

18. Kep. Dirjen PPM & PL No 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
19. IHR Tahun 2005
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

#### C. Tujuan Penyusunan Aksi Program

##### 1. Tujuan Umum

Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Yogyakarta bertujuan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Visi Misi Kementerian Kesehatan dalam Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

##### 2. Tujuan Khusus

Penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Yogyakarta adalah sebagai acuan masing-masing Bagian/Bidang di Lingkungan KKP Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang menjadi tugas, output dan indikator kinerja dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

#### D. Kondisi Umum

Dalam penyusunan rencana dan kegiatan Tahun 2015 dan berdasarkan Permenkes nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas Negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional;
7. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan impor;

10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas Negara
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan dan lintas batas Negara
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan dan lintas batas Negara
16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP

Sejak tahun 2013 KKP Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pencapaian kedua hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Berikut ini beberapa pencapaian keuangan dan pencapaian indicator output sampai tahun 2015.

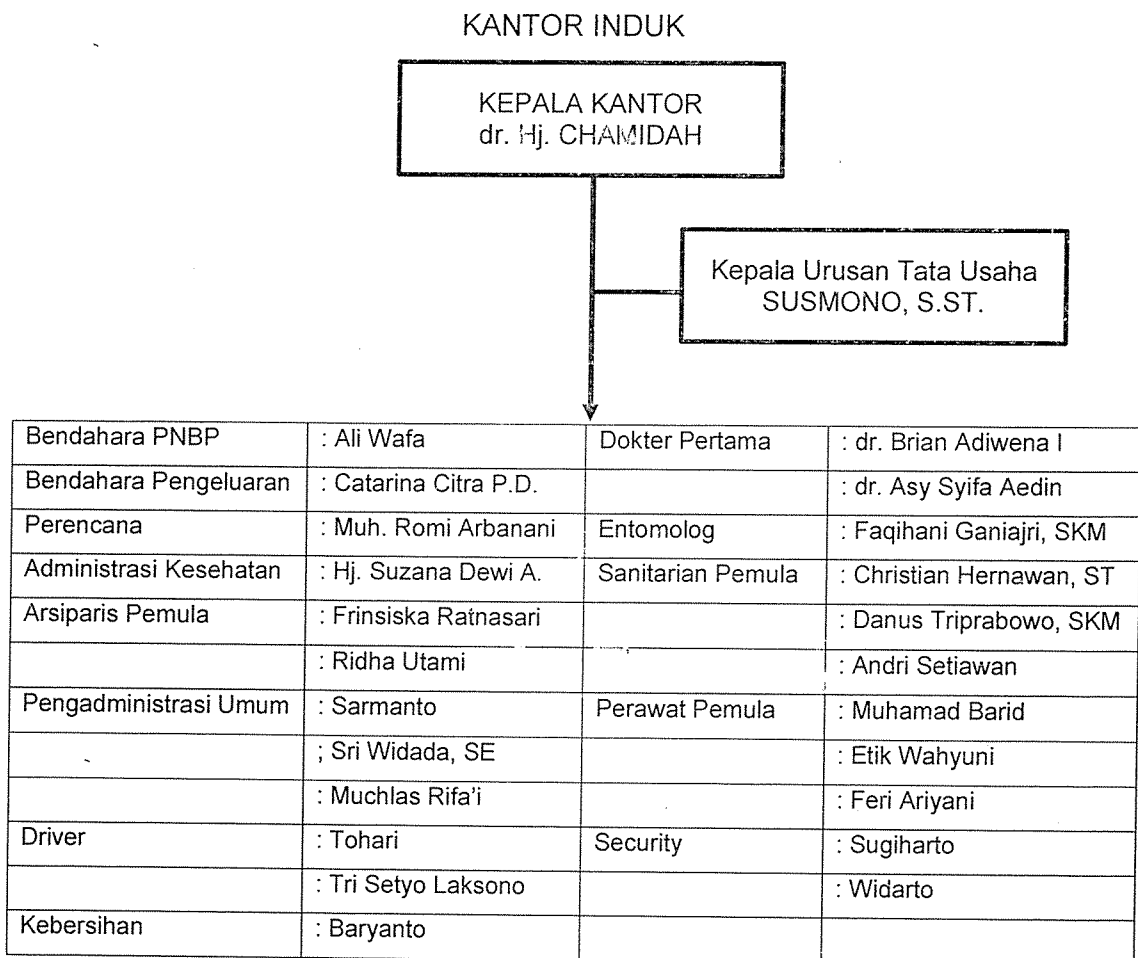
(dalam rupiah)

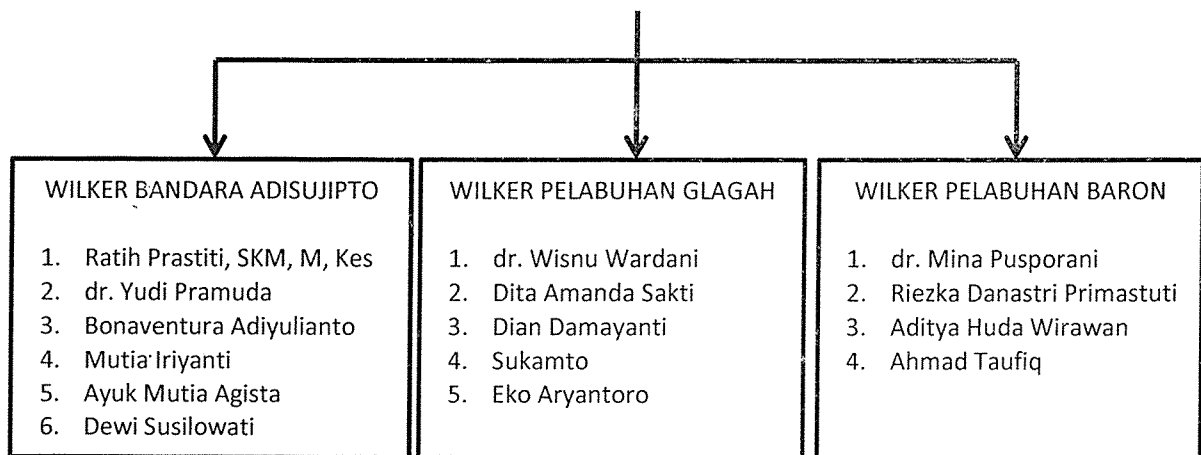
Tahun	Anggaran DIPA	Realisasi	Target PNBP	Realisasi PNBP
2013	3.990.412.000	3.018.414.658 (75,64%)	906.903.000	2.609.370.000 (287,72%)
2014	6.570.131.000	4.489.668.950 (68,33%)	1.176.812.000	3.475.824.000 (295,35%)
2015	3.847.892.000,-	3.168.522.075 (82,34%)	2.629.645.000	6.071.845.000 (230,89%)

### E. Organisasi dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa KKP Yogyakarta terdiri dari Kepala Kantor dan Urusan Tata Usaha, Wilker Pelabuhan Glagah dan Wilker Pelabuhan Baron

Adapun struktur organisasi KKP Kelas IV Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut :





#### F. Ruang Lingkup Tugas

Adapun ruang lingkup tugas masing-masing unit / urusan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta berdasarkan Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dari penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Wilayah kerja Bandara Adisutjipto mempunyai tugas cegah tangkal penyakit di dalam alat angkut pesawat udara yang berangkat maupun yang datang serta wilayah baffer maupun periper bandara
3. Wilayah kerja Pelabuhan Kulon Progo mempunyai tugas cegah tangkal penyakit dilingkungan pantai glagah dan sekitarnya
4. Wilayah kerja Pelabuhan Baron mempunyai tugas cegah tangkal penyakit dilingkungan pantai glagah dan sekitarnya

#### G. Hubungan Kerja

Dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) akan berhubungan kerja dengan unit-unit dilingkungan Kementerian Kesehatan maupun dengan instansi lainnya secara lintas program dan lintas sektor.

Disamping itu juga KKP Yogyakarta berhubungan kerja langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya.

## H. Potensi dan Permasalahan

### 1. Potensi

#### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sumber Daya Manusia KKP Yogyakarta terdiri dari Dokter Umum, Perawat, Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan lain-lain yang terbagi dari beberapa fungsional diantaranya fungsional umum, fungsional epidemiologis, fungsional sanitarian, dan fungsional entomologi.

Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan latar belakang pendidikan yang diperlukan, kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang diusulkan KKP Yogyakarta. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan lanjutan formal, diklat-diklat teknis program dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan.

Berikut ini table yang dapat menunjukkan gambaran Sumber Daya Manusia di KKP Yogyakarta berdasarkan tingkat pendidikannya.



**Tabel Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta  
Tahun 2015**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2 Kesehatan	2
2	S2 Kedokteran	6
3	DIV Teknik Lingkungan	1
4	S1 Ekonomi	2
5	S1 Kesehatan Lingkungan	2
6	S1 Kesehatan Masyarakat	1
7	S1 Biologi	1
8	D3 Kesehatan Lingkungan	5
9	D3 Perawat Umum	8
10	D3 Akuntansi	1
11	D3 Komputer	1
13	SLTA	1

b. Sarana / Prasarana

Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugasnya, merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Gedung yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan di Wilayah Pelabuhan Yogyakarta. Kendaraan operasional roda dua maupun roda empat sebagai sarana dalam memudahkan mobilitas. Sarana dan prasarana lain yang menunjang seperti ambulance, instalasi laboratorium, ruang isolasi dan lain-lain sebagai kekuatan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Berikut ini gambaran inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak.

1) Barang bergerak

Barang bergerak berupa kendaraan operasional roda 6 sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak :

- Mini Bus : 3 Unit
- Mobil Ambulance : 2 Unit
- Pick Up : 1 Unit
- Mobil Operasional :

2) Barang tidak bergerak

- Bangunan Gedung KKP Induk dengan luas = 100 m<sup>2</sup>
- Bangunan Gedung Wilker Bandara Adisutjipto = 9 m<sup>2</sup>
- Bangunan Gedung Wilker Glagah = 50 m<sup>2</sup>
- Bangunan Gedung Wilker Baron = 70 m<sup>2</sup>

3) Peralatan yang menunjang perkantoran dan kegiatan

- Kursi Kerja : 20 buah
- Meja Kerja : 20 buah
- Netbook : 8 buah
- PC. Unit : 8 buah
- Printer : 6 buah
- Alat Pengasapan : 6 buah
- Alat pemantau jentik: 6 sets
- Cool chin : 5 buah
- Almari arsip : 5 buah
- Brankas : 1 buah

c. Norma, Standar, Pedoman, Kriteria (NSPK)

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KKP mengacu pada pedoman-

pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PP dan PL

Adapun pedoman-pedoman yang telah ada diantaranya :

- 1) Pedoman Teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan
- 2) Standar Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan

d. Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2015, DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta sebesar Rp. 3.847.892.000,- dengan 3 program yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Lingkungan Sehat dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, memiliki 3 kegiatan, 20 sub kegiatan, dan 12 SBK (Standar Biaya Khusus). Realisasi Anggaran DIPA/RKA-KL tahun 2015 Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta sebesar Rp. 3.168.522.075,-

e. Kemitraan dan Jejaring

Kegiatan kemitraan dan jejaring kerja KKP di tahun 2015 diantaranya :

- 1) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Kekearifan
- 2) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Sureveilans Epidemiologi
- 3) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Pengendalian Vektor
- 4) Pertemuan Jejaring Dalam Rangka Pengendalian Risiko Lingkungan

2. Permasalahan

a. KLB / Bencana di pintu masuk Negara

Kejadian KLB / Bencana di Negara / daerah lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk negara Lain. Diantaranya KLB Influenza A H1N1, Flu Burung, Sars, Ebola, Cholera di Afrika, dan lain-lain merupakan ancaman di setiap pintu masuk Negara.

b. Jejaring SE masih lemah

Belum terbentuk sistem surveilans epidemiologi yang optimal antar KKP, antara KKP dengan sarana pelayanan kesehatan, antara KKP dengan Dinas Kesehatan, serta antar KKP dengan instansi lainnya di wilayah pelabuhan dan sekitarnya.

c. Dukungan Pemerintah Daerah

Masih kurangnya dukungan dana, sarana dan prasarana, serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di pintu masuk.

d. Profesionalisme kurang

Tenaga SDM di KKP belum terlatih untuk menghadapi kejadian-kejadian penanganan dan penanggulangan PHEIC.

e. Lemahnya Koordinasi dan advokasi

Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dilapangan antara instansi terkait di wilayah pelabuhan. Diantaranya kurangnya koordinasi antara KKP dengan Bea Cukai terkait dengan pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA di pelabuhan.

f. Ancaman *New-Re-Emerging Disease* (PINERE)

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi sangat menakjubkan belakangan ini, ibarat pisau bermata dua, satu sisi teknologi memang dapat mempermudah dan mensejahterakan umat manusia, namun disisi lain teknologi mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan manusia. Meningkatnya teknologi transportasi mengakibatkan makin cepatnya arus perjalanan orang, barang dan alat angkut, sehingga penularan dan penularan penyakit antar Negara semakin cepat, terutama masalah yang berkaitan dengan kesehatan manusia, seperti *New Emerging Disease* seperti Avian Influenza, SARS, Legionnaires Disease, Nipah Virus, Paragoniasis Pulmonalis, HFMD, Ebola, Hanta Fever, Emerging Disease antara lain HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya Dengue Haemorrhagic Fever, Japanese B, Encephalitis, Chikungunya, Cholera, Salmonellosis dan Filariasis. Sedangkan Re-Emerging Disease antara lain : Pes, TBC, Scrub Typhus, Malaria, Anthrax dan Rabies

Pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut akibat pencairan di kutub, perubahan pola angin, perubahan pola hujan dan siklus hidrologi. Disamping itu pemanasan global dapat menyebabkan musim menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan musim ini berdampak kepada meningkatnya populasi dan jenis organisme penyebab penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Ancaman global kian mengancam.

Pemberantasan penyakit menular menjadi lebih sulit akibat perubahan iklim ini karena transmisi beberapa penyakit menular sangat dipengaruhi oleh faktor iklim khususnya suhu dan kelembaban udara. Penyakit-penyakit tropis yang ditularkan melalui Vektor seperti Malaria, Demam Berdarah, Filariasis akan makin meningkat bukan hanya di Negara yang beriklim tropis juga di negara-negara yang bermusim dingin. Di Indonesia, penyakit tersebut semula terjadi di dataran rendah, mungkin pada waktu yang akan datang menyebar ke daerah pegunungan yang membawa hawa dingin, karena pemanasan global tempat yang berhawa dinginpun juga akan menjadi suhu panas.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, NILAI-NILAI, MAKLUMAT DAN MOTTO

Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015 dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi yang telah ditetapkan.

#### A. Visi

Tangguh dan Prima dalam Cegah Tangkal Faktor Risiko untuk mewujudkan masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara

#### B. Misi

Untuk mencapai Visi Kementerian Kesehatan Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Kekejaran & Surveilans Epidemiologi
2. Melakukan Kajian Terhadap Pengendalian Dampak Faktor Risiko Lingkungan
3. Melaksanakan dan Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Terbatas
4. Melaksanakan tindakan cepat dan tepat dalam penanggulangan KLB/bencana dan responsive terhadap PHEIC
5. Menciptakan Kemandirian Masyarakat/Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KKP Yogyakarta Untuk Hidup Sehat dan Berkeadilan.
6. Menjalin dan Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program

### C. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor risiko penyakit yang disebabkan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mencegah masuk dan keluarnya penyakit potensial wabah
- b. Meningkatkan system kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular dan penyakit menular potensial wabah
- c. Mengendalikan faktor risiko angkutan beserta muatannya
- d. Mengendalikan faktor risiko lingkungan pelabuhan
- e. Melindungi masyarakat pelabuhan dan resiko penular penyakit akibat lingkungan tidak sehat
- f. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

### D. Nilai-nilai

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan

#### 1. Pro Rakyat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu ha asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status social ekonomi.

#### 2. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor,

organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsive

Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, social budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) transparan dan akuntabel.

Adapun beberapa nilai-nilai yang disepakati di KKP Yogyakarta guna mendukung nilai-nilai Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

a) Tanggung jawab

Bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan.

b) Bertindak cepat dan tepat

Bekerja sesuai dengan waktu dan tepat sasaran

c) Disiplin

Mampu mentaati segala peraturan dan tidak melanggar segala larangan

d) Keterbukaan

Menyampaikan informasi secara utuh, mampu membuka hati dengan ikhlas dalam memberi dan menerima ide yang membangun.

E. Maklumat dan Motto

1. MAKLUMAT

- a. Melaksanakan TUPOKSI dengan penuh tanggung jawab
- b. Melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat



- c. Melaksanakan tugas dengan saling keterbukaan, kepercayaan, dan berkoordinasi
- d. Mematuhi peraturan tata tertib (meningkatkan disiplin)
- e. Memberikan pelayanan prima

## 2. MOTTO

Motto yang dikukuhkan oleh KKP Yogyakarta dalam mencapai visinya adalah Cegah Tanggal Tangguh dan Prima, melalui :

- a. Cepat dan tepat dalam merespon tanggap darurat
- b. Etis dalam bertindak
- c. Giat dalam bekerja
- d. Antisipasi terhadap segala keadaan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
- e. Hemat dalam menggunakan sumber daya
- f. Tanggung jawab dan taat pada aturan yang berlaku
- g. Amanah dalam menerima dan menjalankan tugas
- h. Netral dalam menyelesaikan masalah
- i. Gunakan prinsip efektif dan efisien
- j. Kerjasama dengan lintas sektor dan instansi terkait
- k. Anti terhadap perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme
- l. Loyal terhadap organisasi

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI & INDIKATOR SASARAN KEGIATAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN YOGYAKARTA

#### A. Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan kebijaksanaan dan program sebagai berikut :

1. Pengendalian lingkungan sehat diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang kesehatan lingkungan yang secara fungsional merupakan sumberdaya inti dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program lingkungan sehat.
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diarahkan untuk memantapkan jejaring lintas program, lintas sector, serta kemitraan dengan masyarakat termasuk swasta untuk percepatan program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular melalui pertukaran informasi, pelatihan, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pemanfaatan sumberdaya lainnya.
3. Penyusunan rencana strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta periode lima tahunan. Perencanaan dibuat berdasar pola (*bottom up*) disesuaikan dengan sumber daya yang ada, situasi dan kondisi. Sedangkan bahan perencanaan didasarkan pada *eviden based epidemiology* dan masukan dari petugas lapangan.
4. Penyusunan perencanaan pengembangan program kegiatan kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta yang sistematis, terukur dan realistis serta dapat dilaksanakan sesuai skala waktu yang ditetapkan (*Sisematic Measure Assesment Reliable Time – SMART*). Upaya ini dilakukan dengan membuat perencanaan bulanan dan perencanaan tahunan untuk setiap bidang dan setiap seksi

5. Pemyempurnaan dan penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap program kegiatan, agar dalam melaksanakan tugas di lapangan terjadi keseragaman.
6. Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta anggaran berbasis kinerja.
7. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta diarahkan pada tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan baik kuantitas dan kualitasnya. Upaya pemberdayaan ini dilakukan dengan cara penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan tingkat kompetensinya/keahliannya, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sangsi bagi yang melanggar aturan. Sangsi mulai dari sangsi ringan sampai sangsi terberat. Menyeleksi pemberian izin belajar, penegakan disiplin pegawai, pembinaan rutin, kaderisasi, pengembangan potensi pegawai. Pemberdayaan ini dimakisudkan agar setiap pegawai mempunyai tingkat kompetensi memadai, dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi bagi organisasi.
8. Pembuatan aturan tata tertib pegawai mengenai absensi kehadiran; pakaian seragam, pelayanan kepada masyarakat, serta pemakaian dan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor, untuk menjamin kelancaran tugas operasional di lapangan serta untuk menjaga sarana dan prasarana agar tidak cepat rusak, maka dilakukan perawatan secara periodic sesuai tingkat kebutuhan.
9. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan pembuatan standar pelayanan, menyiapkan petugas yang mempunyai kompetensi sesuai tingkat kebutuhan, menyediakan sarana dan prasarana dengan didukung teknologi yang memadai serta pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standard dan tidak bertentangan dengan kode etik.
10. Menumbuhkembangkan upaya kemitraan dengan instansi terkait melalui hubungan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan kesepahaman terhadap Kantor Kesehatan

Pelabuhan Yogyakarta akan perlunya kerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan, sosialisasi perundang-undangan, serta berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program pembangunan secara keseluruhan di wilayah Pelabuhan Yogyakarta.

11. Peningkatan jejaring kerja lintas program dan lintas sektoral guna menangani masalah kesehatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

B. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja

Strategi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai skala prioritas. Strategi yang akan dilakukan masing-masing petugas pada KKP Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Pelaksana Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Petugas Pengendalian Karantina Surveilans dan Epidemiologi	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit potensial wabah di pelabuhan / bandaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase factor risiko PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk wilayah</li> <li>- Persentase penganggulangan KLB &lt;24jam</li> <li>- Persentase alat angkut dalam karantina yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan</li> <li>- Persentase kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemic dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan pemerintah</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase alat angkut yang diperiksa dalam kegiatan boarding</li> <li>- Persentase pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dalam rangka penerbitan PHQC</li> </ul>
Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan dan KLR	Meningkatnya pengawasan kualitas lingkungan dan pengendalian vektor, binatang penular penyakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase bebas vector penular penyakit di perimeter area (<i>House Index</i> dan <i>MBR</i> = 0) dan <i>Buffer Area</i> (<i>House Index</i> &lt;1) di lingkungan pelabuhan dan bandara</li> <li>- Persentase angka bebas jentik (ABJ)</li> <li>- Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat</li> <li>- Persentase cakupan tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan.</li> <li>- Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan</li> <li>- Persentase bebas tikus dan pinjal di perimeter area (indeks pinjal = 0)</li> </ul>

		di kapal dalam rangka penerbitan sertifikat P3K
Urusan Tata Usaha	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah rencana koordinasi yang dilakukan</li> <li>- Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan</li> <li>- Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan</li> </ul>

#### A. Kegiatan

1. Pengawasan kedatangan dan keberangkatan pesawat
2. Pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal
3. Pengawasan kesehatan kapal melalui penertiban buku kesehatan
4. Pengawasan pelaksanaan tindakan penyehatan (fumigasi dan disinfeksi)
5. Pengawasan kapal dalam rangka penularan penyakit pes
6. Penanganan Emergency Call
7. Pengawasan lalu lintas komoditi OMKABA Ekspor-Import
8. Surveilans Epidemiologi penyakit menular potensial wabah pada alat angkut
9. Surveilans Epidemiologi penyakit melalui website
10. Surveilans Epidemiologi penyakit di sarana pelayanan kesehatan
11. Surveilans Epidemiologi penyakit menular dalam situasi khusus
12. Promosi Informasi Data SE
13. Sistem Informasi Manajemen Portnet – Tradenet
14. Penelusuran referensi/peraturan perundang-undangan bidang karantina & SE
15. Bintek karantina dan surveilans epidemiologi
16. Investigasi KLB/bencana dan penanganan pengungsi

17. Evaluasi dan penyusunan lapran program pengendalian karantina dan Survey Epidemiologi
18. Akuntabilitas bidang pengendalian karantina dan Survey Epidemiologi
19. Pengawasan obat/alat P3K kapal
20. Pengujian kesehatan nahkoda/ABK, Penjamah makanan & masyarakat umum
21. Monitoring kesehatan kerja
22. Vaksinasi dan penerbitan ICV
23. Pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah
24. Kesehatan matra
25. Pelayanan kesehatan terbatas
26. Laboratorium klinik
27. Screening penyakit tidak menular
28. Pengawasan penyediaan air bersih
29. Pengamanan makanan dan minuman
30. Pemeriksaan hygiene sanitasi kapal
31. Inspeksi sanitasi gedung / bangunan dan perusahaan
32. Pengambilan dan pengiriman sampel udara
33. Kajian air permukaan
34. Pemberantasan lalat
35. Pemberantasan tikus dan pinjal
36. Pemberantasan nyamuk
37. Pengawasan pestisida
38. Pertemuan jejaring dalam rangka pengendalian vector
39. Sosialisasi *Geographical Information System (GIS)*
40. Pelatihan petugas pengendali vektor
41. Pengadaan buku-buku perpustakaan
42. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian
43. Pertemuan teknis
44. Penyusunan
45. Penyusunan POA

46. Penyusunan penetapan Kinerja
47. Evaluasi laporan kegiatan
48. Penyusunan laporan tahunan
49. Penyusunan LAKIP
50. Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi dengan target
51. Penelitian, klasifikasi, registrasi, penerapan system kearsipan
52. Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan
53. Pembinaan administrasi pengelolaan perlengkapan
54. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung
55. Penanaman/pemeliharaan tanaman
56. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB
57. Pengadaan alat pengolah data
58. Akuntansi dan informasi
59. Percetakan/penerbitan/penggandaan/laminasi
60. Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional
61. Dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
62. Penyusunan program dan rencana kerja (RKA-KL)
63. Pembinaan dan konsultasi
64. Promosi kesehatan
65. Perbaikan sarana dan prasarana kantor



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta tahun 2015 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan semua bidang dan bagian di lingkungan KKP Yogyakarta dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019)

Penyusunan RAP dan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Yogyakarta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Kepada semua Bidang dan Bagian yang terlibat dalam penyusunan RAP dan RAK KKP Yogyakarta ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, RAP dan RAK KKP Yogyakarta dapat mewujudkan visi, misi dan strategi yang telah ditentukan, apabila dilakukan dengan penuh dedikasi, koordinasi, bekerjasama yang keras dari segenap staf KKP Yogyakarta serta bekerja sama lintas program dan lintas sector dengan instansi lainnya baik dilingkungan pelabuhan maupun di luar pelabuhan.

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari RAP dan RAK KKP Yogyakarta ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Kepala  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Yogyakarta



*[Handwritten Signature]*  
dr. Hj. Chamidah  
NIP. 196001141989012002

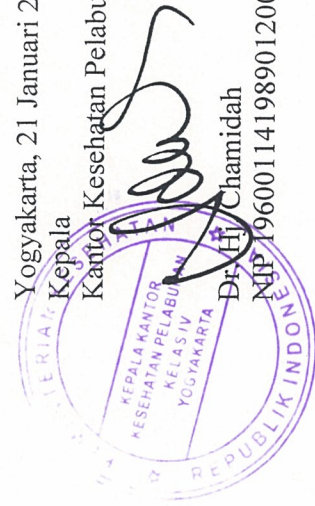
**RENCANA AKSI KEGIATAN**  
Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						
		2015	2016	2017	2018	2019	2019	
Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di pintu masuk negara	1. Pembinaan dan pengawasan Tempat Tempat Umum di lingkungan bandara/pelabuhan	125	125	125	125	125	125	
	2. Pengendalian vector dan binatang pengganggu	20	25	25	25	25	25	
	3. Jumlah sampel Pemeriksaan kualitas air minum	60	75	80	90	95	95	
	4. Jumlah lokasi yang diawasi dalam kondisi matra	3	3	3	3	3	3	
	5. Jumlah dokumen HPAGD	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100	
	6. Jumlah alat angkut yang diperiksa sesuai standar karantina	1.000	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900	
	7. Jumlah surat keterangan laik terbang yang diterbitkan	1.000	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
	8. Jumlah surat keterangan tidak laik terbang yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	
	9. Jumlah surat izin angkut orang sakit diterbitkan	300	310	320	320	320	330	
	10. Jumlah surat izin angkut jenazah diterbitkan	50	60	60	60	70	70	
	11. Jumlah surat pengantar rujukan diterbitkan	8	8	8	8	8	8	
	12. Jumlah surat izin angkut OMKA	6	6	6	6	6	6	
	13. Jumlah International Certificate Vaccination (ICV) diterbitkan	12.000	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000	
	14. Jumlah dokumen perencanaan disusun sesuai standar	2	2	2	2	2	2	
	15. Jumlah dokumen pelaporan disusun sesuai standar	5	5	5	5	5	5	

Yogyakarta, 21 Januari 2015

Kepala

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV Yogyakarta



Dr. H. Chamidah

NIP. 196001141989012002